

HABAIB DALAM PETA POLITIK INDONESIA

MAWARDI¹, AGUS PERMANA²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹mawardiyahya@gmail.com, ²aguspermana978@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu pertama untuk mengetahui bagaimana peran politik Habaib di Kontes Perpolitikan Indonesia dan untuk mengungkap bagaimana kiprah sosial politik Habaib di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan tahapan kerja pengumpulan data (heuristik), verifikasi (kritik), penafsiran (interpretasi) dan penulisan (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, para habaib di Nusantara sudah mulai menunjukkan kiprahnya bukan hanya pada proses islamisasi dan dakwah Islam saja tetapi juga masuk ke wilayah politik, pada masa kolonial ada beberapa habaib yang menjadi motor gerakan kemerdekaan bahkan pernah mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI). Pada masa kemerdekaan keterlibatan mereka dalam bidang sosial dan politik dimulai dari aktivitas di organisasi sosial keagamaan, gerakan-gerakan sosial, mejadi aktivis di partai politik, menjadi anggota parlemen baik di DPD maupun DPR dan terakhir menduduki jabatan politik seperti menteri, atau kepala daerah.

Kata kunci: Habib, Habaib, Nusantara, Politik

ABSTRACT

This study has two objectives: first, to explain Habaib's political role in the Indonesian Political Contest and to reveal Habaib's socio-political role in Indonesia. The method used in this study is a historical research method, namely data collection (heuristics), verification (criticism), interpretation, and writing (historiography). The results of the study show that although it need further proof, the habaib in Nusantara have started to show their work not only in the process of Islamization and Islamic da'wah but also into the political realm. In Polotics, they established Partai Arab Indonesia (Indonesian Arabic Party). During the independence period, their involvement in the social and political fields began with activities in socio-religious organizations, social movements, becoming activists in political parties, becoming members of parliament in both the DPD and DPR and finally holding political positions such as ministers or local administration heads.

Kata kunci: Habaib, Peran, Politik, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Muhammad Atho Mudzhar, dalam konteks ini menjelaskan bahwa peran ulama di Indonesia secara umum sejalan dengan posisi politik Islam yang non-absolut. Sebelum era kolonial, pada masa kemenangan Kerajaan Islam, peran ulama tidak diragukan lagi sangat penting baik dalam urusan agama maupun politik. Sebagian besar kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Banten pada abad ke-16, dimulai oleh para ulama melalui

semacam persaudaraan sufi. Pada abad ke-18, semua kerajaan Islam sudah berada di bawah kendali Belanda, setelah itu banyak dari mereka yang benar-benar bubar. Akibatnya, banyak ulama yang harus mengecilkan peran mereka dalam masalah agama dan kemasyarakatan, sehingga peran mereka hanya bersifat khusus. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani keluar dari pesantren mereka (Mudzhar, 1993, hal. 53).



Selanjutnya, menurut Atho Mudzhar, seiring berjalannya waktu, peran ulama berangsur-angsur kembali masuk ke dalam dunia politik dan makin meluas ke dunia luar, terutama setelah mudahnya pergi haji ke Mekah pada abad ke-19. Gerakan Paderi abad ke-19 (1812-1837) menjadi bukti bahwa peran ulama mulai mengambil nada politik pada masa penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-20, ulama sudah terlibat dalam gerakan Morena (Mudzhar, 1993, hal. 66).

Kontak atau hubungan antara ulama Indonesia dengan ulama Haramain pada masa berikutnya membawa perubahan besar khususnya pada aspek transmisi keilmuan. Proses pembaharuan dan transmisi keilmuan dari Haramain ke Nusantara (Indonesia) yang dilakukan oleh para ulama tersebut, dalam beberapa aspek sangat terabaikan.

Sebagaimana diketahui, terdapat sekian banyak tokoh dalam jaringan ulama abad ke-17 dan ke-18 yang ketika selesai masa studinya di Haramain, tradisi keilmuan itu dibawa pulang kembali ke negerinya masing-masing, kemudian mereka mengambil peran penting melakukan pencerahan bagi umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Terdapat nama-nama seperti 'Abd Al-Rauf Al-Singkili (1024-1105/1615-1693), Muhammad Yusuf al-Maqassari (1037-1111/1627-1699), dan pada abad ke-18 terdapat nama-nama seperti Al-Palimbani, dan Arsyad Al-Banjari. Kemudian pada masa berikutnya tampil ulama dan Kyai seperti Nawawi Al-Bantani (1813-1897), Mahfuz At-Tirmisi (w.1338/1919), Khalil Bangkalan (1819-1825), K.H.R Asnawi Kudus (1861-1959), dan Hasyim Asy'ari (1871-1947) (Noor, 2006, hal. xvii).

Lima ulama yang disebutkan terakhir ini, secara otentik menurut Arifin Noor telah bersinar di dalam sejarah dan tradisi intelektual, sehingga mereka menjadi jaringan ulama atau meminjam teori Ma'sud, sebagai jejak intelektual arsitek pesantren Nahdlatul Ulama (NU). Pesantren sebagai lembaga pendidikan sangat mungkin dan memiliki makna yang sangat khusus. Kekuatan pesantren, di sisi lain, ditunjukkan dalam legitimasi agamanya dan dalam perang melawan penjajah dalam istilah simbolis seperti 'perang suci untuk mengusir orang-orang kafir'. Keunikannya terletak pada pemandu budaya lokal, yang memiliki substansi gaya hidup Islami secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa makin kuat penindasan kolonial, makin kuat pula perlawanan masyarakat pesantren.

Demikian pula jaringan ulama di kalangan Hadrami (*habaib*), untuk menyebut beberapa nama misalnya, Al-Habib Husein bin Abubakar Al-'Idrus (w.17 Ramadan 1169H/24 Juni 1756M), Keramat Luar Batang Jakarta, Al-Habib 'Ali bin Abdurrahman Al-Habshi (1286H/1870M), Kwitang Jakarta, dan Sayyid 'Idrus bin Salim Al-Jufri (1891-1869) yang akrab disapa dengan Guru Tua oleh penduduk Palu Sulawesi Tengah dan *Abna al-Kahirat*. Beberapa ulama tersebut, merupakan ulama kaliber internasional yang memiliki jaringan intelektual dengan ulama Haramain dan Hadramaut. Keluasan ilmu dan kharisma, telah menempatkan mereka memegang peran strategis, tidak hanya sekadar menyebarkan ajaran Islam melalui jaringan pesantren kepada rakyat Nusantara, melainkan juga melakukan pembaruan Islam, transformasi sosial, dan perlawanan terhadap kolonial penjajah tidak terbantahkan. Akhirnya, peran strategis

yang mereka mainkan dalam jaringan atau jejak intelektual pesantren, dalam banyak catatan sejarah kemudian menempatkan mereka selain sebagai ulama kharismatik juga sebagai pejuang yang memperlihatkan nasionalisme keulamaannya, bersama umat Islam mengusir kolonial dan akhirnya dapat menjadi pemimpin atau sultan pada beberapa wilayah di tanah air (Jumat, 2012, hal. 5–6).

Di dalam khazanah penelitian, kajian-kajian tentang habaib sudah cukup banyak, baik yang dilakukan oleh peneliti-peneliti Indonesia maupun peneliti-peneliti luar negeri. Berikut adalah beberapa penelitian yang sedikit banyak berkorelasi dan/atau beririsan dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian dari Syamsul Rijal (2021) yang membahas peralihan trend religiusitas budaya urban pasca reformasi yang kearab-araban, dimulai dari pembahasan tentang majelis-majelis taklim dan zikir yang banyak dipimpin oleh para habaib sampai pada bagaimana habaib menjadi bagian tak terpisahkan dari ‘pasar’ Islam di Indonesia. Kedua, penelitian dari Maulana (2020) yang membahas motif retorika pidato seorang habib terkenal di Indonesia, yaitu Habib Rizieq Shihab (HRS), di mana celah propaganda politik muncul dalam mobilisasi massa secara nasional dan pencuatan simpati terhadap figur pemimpin agama HRS serta penerimaan gagasan dan ide yang terdapat dalam elemen agency melalui politik emosi secara apolitis. Ketiga, penelitian dari Alkatiri & Hayaze (2022) yang membahas berbagai keberadaan penelitian tentang identitas Habaib (jamak untuk Habib) di Indonesia, sebagai tokoh agama pemimpin keturunan Arab. Kehadiran mereka telah diakui dan diakui dan

mereka juga memainkan peran penting sejak masa kolonial hingga hari ini.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa terdapat kebaruan dalam penelitian ini karena lebih menyoroti peran sentral para habaib dalam peta politik di Indonesia. Penelitian ini bukan hanya melihat para habaib sebagai pemuka agama dan pendakwah, tetapi juga sebagai tokoh-tokoh yang berkecimpung di ranah politik praktis dan pemerintahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode sejarah. Langkah kerja Kajian Sejarah dimulai dengan pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan keputusan penulisan (historiografi). Metode pengumpulan data dalam survei ini adalah survei dokumen, observasi, dan wawancara. Pengamatan digunakan untuk mengidentifikasi jejak sejarah habib dan perannya dalam proses penyebaran Islam di Betawi. Observasi dilakukan di Habib Center seperti Desa Bandan dan Desa Luar Batang. Observasi memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan tentang makna dan perspektif dari peristiwa atau proses yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulama dan Politik

Ulama memiliki posisi yang unik dalam masyarakat Islam baik di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Kedudukan seorang ulama yang lahir pada awal sejarah Islam dianggap penting sebagai penerjemah ajaran Islam. Bahkan jika fokus atau area kerja berubah dalam beberapa kasus, mereka masih memainkan peran penting saat ini. Ini karena kekuatan pengetahuan agamanya yang begitu hebat. Hal ini juga didukung oleh



beberapa ayat Alquran dan Hadits Nabi, yang menunjukkan tingginya status ulama. Sebagai perumpamaan untuk hal ini, banyak orang menganggap bahwa 'setetes tinta dari ulama sama dengan setetes darah dari seorang syahid'. Hilangnya ilmu pengetahuan disimbolkan dengan punahnya para ulama.

Pada masa *Khulafâh'u al-Râsyidîn*, ulama peran yang tepat dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Tidak ada kelompok yang terpisah di setiap dunia antara ulama dan penguasa (umara). Namun keduanya disatukan oleh lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi*. Namun pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M), Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas pensiun dari aktivitas politik yang sebenarnya dan belajar ilmu (agama) (Huda, 2007, hal. 214).

Sikap menarik diri ulama dari urusan politik menjadikan ulama mulai terpisah dengan umara. Namun, mengingat pengaruh besar ulama di masyarakat, umara membutuhkan ulama dalam mendapatkan dukungan keabsahan kewenangan mereka. Pemerintahan Umayyah memberikan kebebasan pada ulama untuk berjihad menyangkut fikih. Ulama yang diangkat menjadi hakim, memiliki kebebasan dalam memberikan keputusan hukum. Demikian juga ulama dependen, bebas memberikan fatwa hukum. Akibatnya, banyak keputusan hukum yang diberikan oleh seorang hakim di satu tempat berbeda dengan keputusan hukum yang diberikan hakim di tempat lain. Hal ini juga terjadi dalam masalah fatwa hukum. Untuk itu, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, dari Dinasti Umayyah (Hitti, 2006, hal. 235-236), meminta cendekiawan independen Ibnu Shihabal-Zuhri (w.124 H/741 M)

mengedit sebuah buku dalam kumpulan hadits untuk digunakan sebagai panduan. Hal yang sama juga dilakukan ketika dinasti Abashid Al-Mansur (memerintah 136-158 H/754-775 M) meminta Malik bin Anas untuk menyunting kitab hadits *Al-Muwattha* (Huda, 2007, hal. 214-215).

Di Indonesia, ulama masih merupakan kelompok yang diakui. Oleh karena itu, tidak jarang para penguasa meminta nasihat dari para ulama dalam mengembangkan kebijakannya dalam menangani masalah agama. Bahkan tidak jarang para penguasa mengangkat ulama sebagai penasihat atau mufti kerajaan. Di Indonesia, banyak ulama yang menyandang status birokrat di dalam pemerintahan (Kerajaan Islam), meskipun perannya berbeda. Namun, derajat peranan mereka dan perbedaan institusi dari satu negara ke negara lain yang berbeda, mencerminkan adanya perbedaan latar belakang historis, budaya dan alam dari masing-masing negara ini. Berbedanya derajat Islamisasi dari negara-negara ini berkaitan dengan beberapa faktor. Di antaranya yang penting dan kuatnya budaya pra-Islam dan faktor geografis di dalam sebuah wilayah (Huda, 2007, hal. 216).

Di Kerajaan Aceh, misalnya, Hamzah al-Fansuri diangkat sebagai penasihat kerajaan dan mufti urusan agama pada tahun di bawah pemerintahan Sultan Ala al-Din Ri'ayat Syah. Tidak jarang Hamzah al-Fansuri terlibat dalam urusan politik. Hal ini, antara lain dapat dilihat dalam peran Hamzah—dan mungkin ditemani oleh Symsudin al-Sumaterani—dalam perjanjian damai Aceh dengan Inggris. Sir James Lancaster, seorang utusan khusus Inggris untuk Aceh pada 1011 H/1630 M. mengatakan bahwa ia membicarakan perjanjian perdamaian

dan persahabatan antara Inggris dan Aceh dengan tokoh terkemuka yang ditunjuk Sultan 'Ala al-Din Ri'ayat Syah sebagai wakilnya (Huda, 2007, hal. 216-217).

Syaikh 'Abdul Rauf al-Sinkili merupakan contoh yang lain. Menurut A. Hasjmy, al-Sinkili adalah hakim pada masa empat ratu (1641-1669) yang memerintah kerajaan. Ia diangkat sebagai Mufti dan Kadi Malik al-Adil dari Kerajaan Aceh. Al-Sinkili sering terlibat dalam masalah politik, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan politik internal. Ia juga sangat membantu ketika Syarif Mekkah mengirim delegasi ke Aceh pada masa Sulthanah Zakiyyat al-Din untuk menyelesaikan perdebatan di kalangan masyarakat Aceh tentang izin perempuan sebagai pemimpin (Huda, 2007, hal. 219).

Pada zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma di Mataram, ulama juga ditetapkan pada posisi yang terhormat, yakni sebagai pejabat anggota *Dewan Parampara* (Penasihat Tinggi Kerajaan). Selain itu, Komisi Inkuisisi Islam didirikan dalam struktur pemerintahan. Pejabat dalam jabatan ini adalah ulama, yang kemudian menjadi abdi dalem (pejabat pengadilan) urusan agama dan dipimpin oleh Penge.

Peran ulama di Kerajaan Mataram mulai bergeser ketika pemerintahan dipegang oleh pengganti Sultan Agung, Amangkurat I. Karena alasan-alasan yang bersifat politis yang dipandang tidak menguntungkan penguasa, Amangkurat I melakukan pembantaian massal terhadap ulama. Antara 5000 sampai 6000 ulama dan keluarganya dibunuh di alun-alun Plered (Huda, 2007, hal. 219). Sejak itu, peran ulama di birokrasi pemerintahan menjadi sangat terbatas, antara lain, sebagai

bagian dari kepanjangan tangan raja di bidang agama. Ulama bebas sering menjadi oposan terhadap pemerintah.

Di Kerajaan Banten ketika diperintah oleh Sultan Abdul Fatah, terkenal bergelar Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1695), Syaikh Yûsuf Al-Maqassarî (Azra, 2004, hal. 260-261) diangkat menjadi mufti kerajaan. Syaikh Yûsuf mendapat pengaruh yang besar atas kerajaan. Selain itu, diangkat juga sebagai guru bidang agama di Kesultanan Banten. Tindakan Sultan Agung ini merupakan salah satu sebab ketidakharmonisan hubungan ia dengan putra mahkota, Sultan Haji. Puncak dari intrik politik dalam istana ini adalah kudeta yang dilakukan oleh Sultan Haji terhadap ayahnya. Dalam usaha kudeta yang sukses ini, Sultan Haji bersekutu dengan pihak kompeni. Sementara itu, Syaikh Yusuf bertindak sebagai panglima perang memimpin pasukan Banten untuk mempertahankan kerajaan.

Berbeda dengan ulama-ulama di Aceh, hubungan ulama birokrat dengan ulama rakyat di Jawa sering terjadi ketidakharmonisan. Tidak jarang hubungan ulama birokrat dengan ulama rakyat di Jawa diwarnai dengan konflik di antara kedua kelompok selain dipicu dengan persoalan pemahaman ajaran agama yang berbeda, konflik juga dipicu dengan alasan-alasan politis. Konflik antara kedua kelompok ulama paling awal tercatat antara Wali Songo dengan Syaikh Siti Jenar. Kasus lainnya adalah antara Syaikh Amongraga dengan Sultan Agung Kerajaan Mataram. Kasus antara Haji Mutamakin dengan penghulu keraton Kartasura, *Ketib Anom Kudus*, pada masa pemerintahan Pakubuwana II (1726-1749), merupakan contoh lain. Namun, karena sentimen politis, sering kali polemik-polemik agama yang



bersifat biasa saja telah dipolitisasi oleh penguasa sehingga Negara mendapat legitimasi untuk menindaknya secara refresif (Huda, 2007, hal. 220).

Lahirnya Partai Arab Indonesia (PAI)

Berdasarkan tempat kelahirannya, orang Arab di Indonesia terbagi menjadi dua kaum: Arab asli (*Wulaiti/totok*) dan keturunan Arab (*Muwalad/Peranakan*). Kaum *Wulaiti* membawa-bawa sifat Arab tulen, seperti keras, berdarah panas, mudah marah, sekaligus pemaaf. Dalam hal berbusana pun, kaum *Wulaiti* tidak terlalu banyak variasi, baik warna maupun modelnya. Meski demikian, yang menjadi sumber perselisihan antara kaum *Wulaiti* dan kaum *Muwalad* bukanlah banyaknya perbedaan di antara mereka, melainkan masalah orientasi tanah air. Sementara itu, kaum keturunan Arab (*Muwalad*) berpandangan bahwa Indonesia adalah tanah air mereka dan bukan Hadramaut. Mereka juga menegaskan bahwa semua perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Arab Indonesia selama ini adalah permasalahan di antara kaum *Wulaiti* yang sebenarnya sudah terjadi sejak mereka masih di Hadramaut, oleh karena itu, menurut mereka, kaum keturunan Arab harus melepaskan diri dari dominasi kaum *Wulaiti* (Suratmin & Kwartanada, 2014, hal. 71-72).

Asal usul ide pendirian Partai Arab Indonesia (PAI) erat kaitannya dengan prinsip kampung halaman Indonesia bagi peranakan Arab. Penggagas dari PAI sebagai pengakuan terhadap kampung halaman Arab Peranakan adalah A.R. Baswedan. Gagasan utama dari PAI ini adalah "Revolusi Pikiran". Akan tetapi, mencapai cita-cita tersebut tidaklah mudah dan sederhana karena harus mengambil segala risiko untuk

berjuang. Padahal, sebelumnya A.R. Baswedan adalah seorang pemuda bersinar yang fanatik terhadap kebangsaan dan golongan kerajaannya. Al-Irsyad sedang berkonflik dengan orang Arab lainnya, Al-Rabitha (Suratmin & Kwartanada, 2014, hal. 72-73).

Al-Irsyad tidak terlibat dalam politik, tetapi perannya sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan politik *Devide et Impera*-nya Belanda. Al-Irsyad pada dasarnya merupakan aliran pembaharu yang diajarkan oleh Sayid Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Sayid Rashid Rida. Ajaran ini didirikan oleh orang-orang Arab Indonesia, non-Alawi dan Alawi bahkan sebelum Al-Irsyad didirikan, melalui majalah Al-Manar yang dikelola oleh Rasyid Rida di Mesir dengan menggunakan nama "Sayid" sebelum nama depannya. Donatur terbesar yang mendirikan Al-Irsyad adalah Abdullah bin Alwi Alatas. Kemudian ada dua upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara dua Alawi dan non-Alawi. Pertama dari Awad Sjahbal, ketua kelompok Arab non-Alawi Surakarta, kemudian Ismail Alatas, putra Abdullah bin Alwi Alatas, salah satu kelompok Alawi dan pendukung Al-Irsyad saat itu. Penyebab konflik antara kedua kelompok ini sangat serius, namun upaya kedua untuk menyelesaikan perselisihan ini sebenarnya sangat banyak dan juga serius. Kegagalan upaya rekonsiliasi yang begitu serius mungkin tidak ada hubungannya dengan kebijakan tradisional kolonial Belanda yang selalu berusaha mengurangi pengaruh keturunan Arab di Indonesia bagi diri mereka sendiri (Al-Gadri, 1996, hal. 165-166).

Indo Arabisch Verbond (IAV) didirikan pada tahun 1930 dan

menentang PAI. Keturunan Arab harus memenuhi kewajibannya kepada negara Indonesia. Untuk memenuhi kewajiban ini, mereka harus meningkatkan posisinya dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kebudayaan keturunan Arab adalah kebudayaan Indonesia, sepanjang kebudayaan itu tidak bertentangan dengan Islam.

Kiprah Habaib di Organisasi Sosial dan Keagamaan

Keterlibatan habaib dalam kancah politik bangsa dimulai dari ranah sosial seperti aktivitas berbagai organisasi sosial keagamaan. Kegiatan ini dimulai dengan berdirinya Rabithah Alawiyah. Organisasi asli yang mengumpulkan Alawi Nusantara. Organisasi ini resmi berdiri pada 27 Desember 1928, atau dua bulan setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian berdasarkan akta notaris Mr. A.H. Van Ophuijsen, seseorang dari Alawiyin mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk mendirikan Perhimpunan Alawiyin yang diberi nama Al-Rabithatoel Alawijah. Tujuannya adalah menjadi masyarakat sosial bagi umat Islam Nusantara, khususnya Alawiyin melalui pendidikan dan dakwah Islam dalam kerangka negara. Orang Arab Hadrami yang tiba di Nusantara sebelum abad ke-18 sepenuhnya berasimilasi dengan penduduk setempat. Akibat asimilasinya, banyak keturunannya menggunakan nama lokal daripada nama Arab.

Orang-orang yang datang setelah abad ke-18 tidak mungkin berasimilasi. Mereka melakukan mahar dengan mengajarkan agama dengan bersya'ir. Ini membuktikan budaya Arab yang sangat tinggi. Secara khusus perkembangan aktivitas masyarakat Alawiyin dan keturunan Arab kemudian mengikuti kemunduran dan

arus gerakan politik Indonesia. Banyak dari mereka bergabung dengan partai politik dan bergabung dengan organisasi Partai Arab (PAI) di Indonesia karena partai nasionalis belum membuka pintunya untuk orang asing. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan pembubaran PAI, mereka bergabung dengan partai politik sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sementara itu, Persatuan Rabithah Alawiyah terus berkarya di kancah sosial sebagai kelanjutan dari perkumpulan *Jamiat Kheir*. Kegiatan perpolitikan pada saat itu tentunya berdampak pada keberjalanan negara setelah proklamasi. Soekarno yang menjadi presiden RI pertama merasakan pengaruh dari terbentuknya organisasi Islam keturunan Arab.

Ada beberapa kelompok yang diketahui aktif di Rabithah Alawiyah, antara lain kelompok Dr. Salim Segaf Aljufri, Mustasyar (Dewan Penasihat), Habib Salim Segaf Al-Jufri adalah seorang ulama dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Seorang ulama dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia dalam Kabinet Indonesia II dari 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014, di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Oman dari Desember 2005 hingga 2009, menggantikan Muhammad Maftuh Basyuni. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wakil Direktur WAMY (*World Assembly of Muslim Youth*) di Asia Timur dan Tenggara, dan Direktur Pusat Penasihat Syariah. Habib Anis Shahab sebagai



Mustasyar (Dewan Penasihat), Habib Muhammad Alhamid sebagai Mustasyar (Dewan Penasihat). Habib Fadel Muhammad Alhaddar sebagai Mustasyar (anggota dewan penasihat); Ia menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu II; dan Anggota DPR RI periode 2014-2019. Kemudian Habib Aziz Mochdar sebagai Mustasyar (Dewan Penasihat), Habib Ismet Abdullah Alhabsyi sebagai Mustasyar (Dewan Penasihat), Habib Anas Yahya Mulachela sebagai Mustasyar (Dewan Penasihat) Habib Ahmad Fahmi Assegaf, sebagai Mustasyar (Dewan Penasihat), dan Habib Muhsin Idrus Alhamid sebagai Dewan Syuro.

Beberapa habib juga aktif dalam organisasi FPI Sebuah organisasi yang akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Habaib yang terkenal aktif di ormas ini adalah Habib Habib Rizieq.

Habib yang aktif sebagai pengurus MUI pusat dan daerah yakni Habib Ali Hasan Bahar sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Bayhaqi, 2020). Ali Hasan Albahar, Habib Zein Umar bin Smith sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.

Peta baru pergerakan politik Islam Indonesia terungkap dalam pemilihan umum 2019, terbukti dengan Aksi Bela Islam yang pertama kali dilakukan pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan Aksi 212. Hal ini menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahapurnama atau yang lebih dikenal Ahok. Gerakan besar-besaran ini berputar di sekitar pelataran Monumen Nasional (Monas) yang dihadiri oleh umat Islam dari berbagai kalangan baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Aksi tersebut berupa demonstrasi pidato dan doa yang diikuti kurang lebih 3 juta peserta. Gerakan 212 dipicu oleh kemarahan umat Islam, khususnya di Jakarta, yang keberatan dengan pemelintiran ayat 51 Surah Al-Maidah yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Aksi ini banyak

diberitakan oleh berbagai media baik di dalam maupun luar negeri (Abdul, 2016). Salah satu pendiri gerakan 212 adalah seorang dokter yaitu Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab yang dikenal sebagai pemimpin dan pendiri organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Konstelasi politik di Jakarta menjelang pemilihan Gubernur menjadi katalisator munculnya gerakan keagamaan seperti Ijtima Ulama yang kemudian bergeser menjadi GNPf Ulama dan akhirnya muncul juga Persaudaraan Alumni 212. Banyak kalangan habaib yang aktif di berbagai gerakan tersebut.

Habib Hasan Bahar bin Smith adalah salah satu contoh Habib yang aktif di GNPf Ulama. Habib Hasambahar bin Smith, anggota. Bahar bin Smith telah menjadi pendiri dan pemimpin Dewan Pembela Nabi sejak 2007. Habaib yang aktif di Persaudaraan Alumni 212 antara lain Habib Muhammad Rizieq Shihab sebagai Pembina Tunggal, pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok Muslim yang dilarang oleh pemerintah pada Desember 2020; dan Habib Mukhsin Zeid Al-Attas, sebagai Anggota Penasihat (Ibrahim, 2018).

Habaib di Partai Politik

Di samping aktif di berbagai lembaga sosial dan kemasyarakatan dewasa ini para habaib juga mulai masuk di kancah politik baik nasional maupun daerah. Sebagian dari mereka ada yang menjadi aktivis dan pengurus partai, baik di pusat daerah. Ada pula yang menduduki jabatan politis seperti Menteri, anggota DPR maupun DPD.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang terbuka bagi golongan pagan, suku, ras, dan golongan, bersatu dalam visi, misi, program perjuangan, keanggotaan, dan

kepemimpinan. Berlawanan dengan tujuan pembentukan partai, PKB independen dari pihak manapun dalam hal kekuasaan. Sebagai partai terbuka, PKB menyambut anggota dan pengurus dari berbagai kalangan, termasuk habaib. Di antara Habaib yang menjadi aktivis PKB adalah Wakil Sekretaris Habib Hiral al-Aided, Habib Hadi Zainal Abidin (politikus PKB yang pernah menjabat Wali Kota Probolinggo dari 2019 hingga 2024). Habib Hadi Zainal Abidin adalah politikus PKB yang pernah menjabat Wali Kota Probolinggo dari tahun 2019 hingga 2024. Pada awal pembentukan PKB pada tahun 2004, Habib Hadi resmi bergabung dengan PKB. Habib Hadi diangkat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB di Kota Probolinggo (sejak 2005). Dan pada tahun 2008, Habib Hadi diberi tanggung jawab lebih untuk menjadi anggota Dewan Syuro PKB Jawa Timur pada tahun 2009. Ia terpilih menjadi anggota negara bagian Jawa Timur pada pemilihan umum 2009, menjadi anggota DPR RI pada pemilihan umum 2014, dan Wali Kota Probolinggo pada pemilihan umum 2018.

Sebagai partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga banyak diisi oleh para ulama dan cendekiawan serta golongan santri termasuk di dalamnya ulama dari kalangan habaib. Setidaknya tercatat beberapa habaib yang aktif di PPP di antaranya: Habib Hasan Mulachela, Ketua DPP PPP, dan Habib Farhan Al Amri, Ketua Bidang Pemenang Dapil (Liputan6.com, 2021); Habib Mahdi, DPC PPP Kabupaten Probolinggo (Dza/dik, 2021); Habib Salim Quraisy (Dwi, 2021) Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo.

Ada pula habaib yang menjadi anggota dan simpatisan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Anggota) beberapa orang habaib yang tercatat sebagai anggota dan simpatisan PDIP yakni: Habib Husein Muhdar Al Mohdar, Kader PDIP; Habib Moh Sholeh Al Muhdar, Kader PDIP; dan Habib Ali Assegaf, Kader PDIP (Gunadha & Ardiansyah, 2019).

Di Partai Gerindra juga ada Habib Mahdi Al-Athas, Ketua Bidang Agama Islam (*Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Partai Gerindra, 2022*) sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. Kalsel 2019-2024, Sekretaris Komisi 1 dan aktif di Partai Gerindra serta tercatat sebagai Pembina Yayasan Al-Husna Kalsel.

Di Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) muncul nama Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak tahun 2004. Habib Aboe Bakar adalah anggota DPR-RI, anggota Kalimantan Selatan 1, yang meliputi Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin. Terhitung sejak 5 September 2020, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan untuk menyejahterakan periode khidmat 2020-2025 (*Aboe Bakar Al Habsyi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, n.d.*).

Di Partai Amanat Nasional (PAN) ada Habib Hafizi Al Habsyi, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Hulu (Rahman, 2019). Habib Hafizi Al Habsyi dipercaya memimpin DPD PAN HST periode 2017-2022 menggantikan Zainuddin MD. Habib Hafizi Al Habsyi saat menjadi anggota PAN khususnya di HST ini berperan aktif dan membesarkan partai PAN.

Dan terakhir Habaib di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ada



beberapa keturunan habib yang akti di PSI di antaranya Habib Husin Shihab, Caleg PSI. Habib Husin Shihab lahir pada 26 April 1984, di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Kakek dari pihak ibu adalah guru Alquran, Habib Muhammad Alhinduan, seorang imam masjid di Pamekasan, Pamekasan. Husin Shihab, calon dari partai PSI di daerah pemilihan Jawa Timur, dibatalkan pada 2018 karena melanggar nilai-nilai PSI menghormati perempuan (Akbar, 2020).

Tsamara Amany Al-Athas, Ketua DPP PSI, Penulis (*Partai Solidaritas Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2022), seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia Indonesia. Sebelum Pilpres 2019, ia menjadi juru bicara calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin (*Tsamara Amany Alatas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2022).

Habaib Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Habib Abdurrahman Bahasyim adalah anggota DPD RI Kalsel. Sebelum terpilih menjadi anggota DPD RI, Habib Abdurrahman Bahasyim aktif di berbagai kelompok agama, antara lain Ketua MUI Banjarmasin Selatan, Mustashar NU Banjarmasin Selatan, dan Ketua FPI Kalsel. Habib Said Abdurrahman, anggota DPD Kalimantan Tengah. Politisi ini menduduki kursi perwakilan DPD-RI di Kalimantan Selatan, setelah memenangkan Habib Abdurrahman Bahasyim dalam pemilihan umum 2014 berbagai agama pernah menjadi anggota DPD RI. Termasuk Ketua MUI Banjarmasin Selatan mustashar NU Banjarmasin Selatan dan Ketua FPI Kalsel (*Habib Abdurrahman Bahasyim*, 2022).

Habaib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI

Habib Nabel Al-Musawa, DPR RI 2009-2014, anggota Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang saat ini berdomisili di Parakanjaya Kemang, Bogor. Nabel Al Musawa adalah sesepuh Majelis Rasulullah SAW Center, sebuah ormas Islam. Lahir 5 Mei 1967 di Cianjur, pria ini merupakan anggota Kalsel II, termasuk Kabupaten Tanah Laut, dan pernah menjadi anggota Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPR RI periode 2009 hingga 2014. Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Banjarmasin dan Banjarbaru (*Habib Nabel Al Musawa*, 2021).

Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Anggota Dewan Kehormatan Komite III. Lahir 15 Oktober 1964. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak tahun 2004. Habib Aboe Bakar adalah anggota DPR-RI di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tapin. Terhitung sejak 5 September 2020, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan untuk mensejahterakan periode khidmat 2020-2025 (*Aboe Bakar Al Habsyi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, n.d.).

Habib Ali Alwi, kelompok DPD MPRRI. Ambon, 2 September 1967. Sebelum bergabung dengan DPD RI, Habib Ali Alwi adalah anggota DPRD Kabupaten Tangerang 1999-2004, anggota DPRD Banten 2004-2009, dan Banten 2004-2004. Ia anggota DPRD pada 2009. Habib Said Abdurrahman, kelompok DPD MPR RI.

Kelompok DPD di antaranya adalah Habib Abdurrahman Bahasyim, di MPR RI. Sebelum terpilih menjadi anggota DPD RI, Habib Abdurrahman

Bahasyim aktif di berbagai kelompok agama, antara lain Ketua MUI Banjarmasin Selatan, Mustashar NU Banjarmasin Selatan, dan Ketua FPI Kalsel (*Abdurrahman Bahasyim, 2022*).

Kemudian ada Habib Zakaria Bahasyim, kelompok DPD MPR RI dan Habib Hamid Abdullah. Habib Hamid Abdullah dianugerahi penghargaan "Satya Lencana Karya Satya XX" pada tahun 2004 untuk tingkat usahanya yang tinggi (*Hamid Abdullah, 2022*).

Habaib Yang Pernah Di Jabatan Politik (Menteri, Gubernur, Bupati)

Pasca runtuhnya rezim orde lama dan orde baru, sistem multipartai dihapuskan dan keputusan politik keturunan Arab masih terpecah-pecah, namun sebagian besar tetap memilih partai Islam. Sebagian besar masuk ke PPP, Partai Golkar, dan selebihnya ke PDI. "Tentu saja, saya paling suka partai Islam, tapi saya pikir banyak yang akan memilih partai yang lebih duniawi," kata Ismail Fajrie Altas, mahasiswa PhD bidang antropologi dan sejarah di University of Michigan, AS (*Affan, 2015*).

Menurut Hasan Bahanan, pada masa Presiden Suharto, orang Arab diharuskan "ditugaskan" untuk duduk di DPR (pusat dan daerah). Umumnya, sebuah partai dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) ditugaskan untuk menunjuk seorang wakil. Namun, pemilihan itu dianggap mewakili keturunan Arab karena menganut sistem perwakilan proporsional dan memilih citra partai. Presiden Suharto juga telah mempercayakan banyak orang Arab untuk duduk di kabinet, termasuk Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Pendidikan Fuad Hassan, Menteri Koordinator Ekonomi dan Fiskal Saleha Afif, dan Menteri Keuangan Fuad Bawazier (*Affan, 2015*).

Bahkan setelah pemerintahan Presiden Suharto berakhir, "tradisi" menambahkan satu atau dua orang Arab ke dalam kabinet terus berlanjut. Ada nama Alwi Sihab yang dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menlu. Alwi Shihab juga bertanggung jawab memimpin Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Ketika Megawati berkuasa sebagai presiden, posisi Menteri Agama dipercayakan kepada seorang tokoh Arab, Sayed Agil Hussin al-Munawar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menunjuk Salim Segaf Arjufuri. Ia dikenal sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Dan ketika Joko Widodo terpilih sebagai presiden, Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Anise adalah cucu AR Basswedan, pendiri PAI Partai Arab Indonesia (*Affan, 2015*).

KESIMPULAN

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain agar perilaku tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan orang yang memiliki kekuatan tersebut. Pada dasarnya, kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sumber kekuasaan yang dapat mendukung sektor kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut dapat berupa media arus utama, media arus utama, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat, atau militer. Habaib dalam konteks politik di Indonesia mempunyai peran yang besar dalam pemikiran dan kiprah mereka sehingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari masa ke masa, 'buah' kemerdekaan bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pemikiran politik Habaib, di Indonesia berdasarkan tempat



kelahirannya, orang Arab Indonesia terbagi menjadi dua kelompok: Arab eks (*Wulaiti/totok*) dan Arab Arab (*Muwalad/Perakan*). *Wulaiti* adalah darah Arab murni dan biasanya lahir dan besar di negara-negara Arab, khususnya Hadramaut. *Mladi*, di sisi lain, adalah darah campuran dan lahir dan besar di Indonesia. Kaum *Wulaiti* membawa-bawa sifat Arab tulen, seperti keras, berdarah panas, mudah marah, sekaligus pemaaf. Dalam hal berbusana pun, kaum *Wulaiti* tidak terlalu banyak variasi, baik warna maupun modelnya. Meski demikian, yang menjadi sumber perselisihan antara kaum *Wulaiti* dan kaum *Muwalad* bukanlah banyaknya perbedaan di antara mereka, melainkan masalah orientasi tanah air. *Wulaiti* selalu memandang bahwa tanah air mereka adalah Hadramaut, sedangkan Indonesia hanyalah menjadi tempat merantau (*Al-Mahjar*).

Sementara itu, kaum keturunan Arab (*Muwalad*) berpandangan bahwa Indonesia adalah tanah air mereka dan bukan Hadramaut. Alasannya, mereka terlahir dan besar di Indonesia. Mereka memiliki ibu dari wanita-wanita Indonesia, bahkan banyak mengadopsi budaya Indonesia secara utuh. Mereka juga menegaskan bahwa semua perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Arab Indonesia selama ini adalah permasalahan di antara kaum *Wulaiti* yang sebenarnya sudah terjadi sejak mereka masih di Hadramaut, oleh karena itu, menurut mereka, kaum keturunan Arab harus melepaskan diri dari dominasi kaum *Wulaiti*.

Kiprah Habaib di dalam Politik Indonesia, dibagi kedalam beberapa bagian: Pertama, Habaib dalam Organisasi Sosial dan Keagamaan; Kedua, Habaib di Partai Politik; Ketiga, Habaib di Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), dan Keempat, Habaib di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, *Kelima*, Habaib di Jabatan Politik (Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G. (2016). *Tentang Tafsir Surat Al Maidah 51 dan Ahok Jadi Tersangka*. fimela.com. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/2653432/tentang-tafsir-surat-al-maidah-51-dan-ahok-jadi-tersangka>
- Abdurrahman Bahasyim. (2022). m.merdeka.com. <https://m.merdeka.com/abdurrahman-bahasyim/profil>
- Aboe Bakar Al Habsyi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.). wikipedia.com. Diambil 14 Februari 2022, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Ab_oe_Bakar_Al-Habsyi
- Affan, H. (2015). *Ideologi Politik Keturunan Arab: Islamis, Sosialis Hingga Komunis*. bbc.com. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151016_indonesia_arabindonesia_sikappolitik
- Akbar, M. F. (2020). *Tsamara Respons Kader PSI Disebut Jadi Pelapor Haikal Hassan: Perlu Diluruskan, Non Aktif Sejak 2018*. depok.pikiran-rakyat.com. <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091136194/tsamara-respons-kader-psi-disebut-jadi-pelapor-haikal-hassan-perlu-diluruskan-non-aktif-sejak-2018?page=2>
- Al-Gadri, H. (1996). *Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda*. Mizan.
- Alkatiri, Z., & Hayaze, N. A. K. (2022). *Critical Literature Study on Habaib*

- Identity In the Constellation of Islamic Studies in Indonesia From the Colonial Period to the Present. *Cogent Arts & Humanities*, 9(1). <https://doi.org/DOI:10.1080/23311983.2022.2096286>
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Bayhaqi, A. (2020). *Terdepak, Tokoh 212 Tak Masuk Kepengurusan MUI 2020-2025*. merdeka.com.
- Dwi, A. (2021). *Duet Munjidah Wahab-Habib Salim Quraisy Ditunjuk Pimpin PPP Jatim*. politik.rmol.id. <https://politik.rmol.id/read/2021/09/22/505230/duet-munjidah-wahab-habib-salim-quraisy-ditunjuk-pimpin-ppp-jatim>
- Dza/dik. (2021). *Habib Mahdi Terpilih Aklamasi dalam Rapimcab PPP Kabupaten Probolinggo*. ikilhojatim.com/. <https://ikilhojatim.com/habib-mahdi-terpilih-aklamasi-dalam-rapimcab-ppp-kabupaten-probolinggo/>
- Gunadha, R., & Ardiansyah, N. (2019). *Tiga Habib Dibiai Megawati Jadi Kader PDIP*. suara.com. <https://www.suara.com/news/2019/04/02/150043/tiga-habib-dibiai-megawati-jadi-kader-pdip>
- Habib Abdurrahman Bahasyim*. (2022). tirto.id. <https://tirto.id/m/habib-abdurrahman-bahasyim-R5>
- Habib Nabil Al Musawa*. (2021). alumniipbpedia. <https://www.alumniipbpedia.id/post/habib-nabil-al-musawa>
- Hamid Abdullah*. (2022). merdeka.com. <https://www.merdeka.com/hamid-abdullah/profil>
- Hitti, P. K. (2006). *History of The Arabs*. Serambi Ilmu Semesta.
- Huda, N. (2007). *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.
- Ibrahim, G. M. (2018). *Ini Struktur Persaudaraan Alumni 212, Amien Rais Ketua Penasihat*. detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-3836227/ini-struktur-persaudaraan-alumni-212-amien-rais-ketua-penasihat>
- Jumat, G. (2012). *Nasionalisme Ulama, Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid 'Idrus bin Salim Al-Jufri (1891-1969)*. Kementrian Agama RI.
- Liputan6.com. (2021). *Ini Susunan Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4469600/ini-susunan-pengurus-dpp-ppp-periode-2020-2025>
- Maulana, F. (2020). Political Propaganda, Mass Mobilization, and Narrative of Habib Rizieq Shihab In The Akbar 212 Reunion. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 251–294. <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v5i2.2327>
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-Fatwa Majels Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. INIS.
- Noor, I. A. (2006). *Pengantar dalam buku Mas'ud, Dari Haramain ke Nusantara Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Kencana.
- Partai Solidaritas Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. (2022). wikipedia.com. https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Solidaritas_Indonesia
- Rahman, M. T. (2019). *Terpilih di Parlemen HST, Habib Hafizi Siapkan Program Khusus Bidang*



Keagamaan.

kasel.antaranews.com.

- Rijal, S. (2021). Performing Arab Saints and Marketing the Prophet: Habaib and Islamic Markets in Contemporary Indonesia. *Archipel [Online]*, 99. url:<http://journals.openedition.org/archipel/1719>;DOI:<https://doi.org/10.4000/archipel.1719>
- Suratmin, & Kwartanada, D. (2014). *Biografi A.R Baswedan, Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan*. Buku Kompas.
- Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Partai Gerindra. (2022). partaigerindra.or.id. http://partaigerindra.or.id/files/SUSUNAN_PENGURUS_DEWAN_PIMPINAN_PUSAT_PARTAI_GERINDRA.pdf
- Tsamara Amany Alatas - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.* (2022). [wikipedia.com. https://id.wikipedia.org/wiki/Tsamara_Amany_Alatas](https://id.wikipedia.org/wiki/Tsamara_Amany_Alatas)